

**PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MASYARAKAT DI KECAMATAN TONDANO  
UTARA KABUPATEN MINAHASA**

**GEILORNA  
JOYCE J. RARES  
SALMIN DENGO**

[geilorna081@student.unsrat.ac.id](mailto:geilorna081@student.unsrat.ac.id)

**ABSTRACT**

*Basically, the People's Business Credit (KUR) is a credit or financing of working capital and / or investment to micro, small, medium enterprises, and cooperatives in the field of productive and decent but not yet bankable businesses which are partially guaranteed by the guarantor company. Through the KUR program, the government expects to accelerate the development of economic activities, especially in the real sector, in the context of poverty alleviation and expansion of job opportunities. The purpose of this study is to determine the effect of the implementation of the People's Business Credit (KUR) program on the development of community micro-enterprises in North Tondano District, Minahasa Regency. The research method used is quantitative research method. The sample in the study was people who were classified as receiving People's Business Credit (KUR) as many as 40 respondents. The results obtained from this study are; The implementation of the People's Business Credit Program has a positive effect on Community Micro Enterprise Development shown by the regression equation  $Y = 29.440 + 0.175X$  as well as hypothesis testing with t-Test which shows a calculated t value = 6.789 greater than table t = 1.686 with a significant level of  $0.000 < 0.05$  which means that  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted. The magnitude of the influence shown by the coefficient of determination with R Square is 0.548. This can be interpreted as the influence of the implementation of the KUR program on the variable of community micro business development is 54.8%.*

*Keywords: Implementation, People's Business Credit Program, Development, Micro Business*

**ABSTRAK**

Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin. Melalui program KUR, pemerintah mengharapkan adanya percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pengembangan usaha mikro masyarakat di Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian adalah masyarakat yang tergolong dalam penerimaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 40 responden. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu; Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat berpengaruh positif terhadap Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat ditunjukkan dengan persamaan regresi  $Y = 29,440 + 0,175X$  serta pengujian hipotesis dengan Uji-t yang menunjukkan nilai t hitung = 6,789 lebih besar dari t tabel = 1,686 dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Besar pengaruh yang ditunjukkan dengan koefisien determinasi dengan R Square sebesar 0,548. Hal ini dapat diartikan bahwa besar pengaruh implementasi program KUR terhadap variabel pengembangan usaha mikro masyarakat sebesar 54,8%.

Kata Kunci: Implementasi, Program Kredit Usaha Rakyat, Pengembangan, Usaha Mikro

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan penduduk Indonesia dapat dikatakan masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, menjadikan kesejahteraan penduduk Indonesia perlu ditingkatkan.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbagai program telah dilaksanakan dan terus diefektifkan mulai dari Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Keluarga Harapan (PKH), program PNPM Mandiri, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program lainnya dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Program-program ini diharapkan nantinya memperkecil beban ekonomi masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat meningkat sekaligus mendongkrak kemampuan masyarakat untuk mendapat pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

Usaha mikro menjadi salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara. Dalam kondisi ekonomi yang belum kondusif, pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah dianggap sebagai salah satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Saat ini peningkatan kinerja usaha mikro masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi persaingan. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pengusaha

usaha mikro dalam meningkatkan kinerja usahanya adalah keterbatasan modal yang dimiliki. Maka dari itu, usaha mikro perlu dikembangkan karena, distribusi kesempatan kerja menurut skala usaha menegaskan bahwa usaha mikro merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Usaha mikro juga penting sebagai salah satu sumber penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB).

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil khususnya dalam akses permodalan adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat. Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin.

Dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Tonadano Utara Kabupaten Minahasa ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengembangkan usaha. Dengan cara ini pelaku usaha mikro dapat terbantu dalam masalah permodalan dan pembiayaan, serta akan memperkuat usaha mikro dalam mengembangkan usahanya, sehingga akan meningkatkan pendapatan usaha mikro itu sendiri.

Dalam implementasi program KUR di Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, terdapat faktor yang mempengaruhi implementasi program KUR yaitu kurangnya sosialisasi manfaat program KUR, pengawasan, sikap, dan kualitas sumber daya pelaku usaha mikro. Di samping

itu, sosialisasi program KUR oleh perbankan sebagai pelaksana program itu masih belum maksimal sehingga tidak banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang mengetahui program tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat di Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Ayu Enjelia Patrisia Suoth, Florence D. J. Lengkong, Salmin Dengo (2019). Dengan judul Pengaruh Implementasi Program BUMDES Terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Desa Tonsewer Selatan Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil pengujian, maka hipotesis yang dikemukakan dapat diterima yaitu Implementasi Program BUMDES berpengaruh terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Tonsewer Selatan Kec. Tompaso Barat. Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson product moment untuk mengukur keeratan hubungan antara kedua variabel tersebut, didapatkan besar korelasi 0,342 (korelasi positif) dengan signifikan sebesar 0,003 yang berarti kedua variabel ini cukup kuat dan signifikan dari angka sig. (2-tailed) sebesar  $0,003 < 0,05$ . Berdasarkan tabel analisis regresi linier sederhana, terlihat hasil Fhitung diperoleh sebesar 9,673 dengan signifikan 0,003 kurang dari 0,05 ( $0,003 < 0,05$ ) maka model dapat dipakai

untuk memprediksi variabel kompetensi. Harga Fhitung dibandingkan Ftabel dengan degree of freedom (df) yang didapat menggunakan rumus  $df(n1) = n-k$ , sehingga diperoleh sebesar 1,666 pada taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $9,673 > 1,005$ ) artinya Implementasi Program BUMDES berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Dari hasil pengujian tabel koefisien untuk variabel dapat diketahui hasil variabel Implementasi Program BUMDES sebesar 0,335 dengan konstanta 21,659. Dapat dilihat hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh Implementasi Program BUMDES terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada taraf 1%.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Mondong, Femmy Tulusan, Novva Plangiten (2022). Dengan judul Pengaruh Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai UMKM Terhadap Pengembangan Usaha di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Melalui penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki umur 20-29 tahun dengan jumlah responden 10 (33,3%) dari 30 responden dan sebagian besar berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 19 orang (53,3%) dari 30 responden. Sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki usaha Rumah Makan yang berjumlah 10 orang (33,3) dari 30 responden. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari variabel yang diteliti oleh peneliti melalui perhitungan yang menggunakan bantuan program komputer SPSS 25.0, maka nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,10$ , dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa

- terdapat pengaruh dari variabel implementasi kebijakan (X) terhadap variabel pengembangan usaha (Y) dan berdasarkan nilai *t*hitung sebesar 44,098 > *t*tabel 1,7013 maka dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi kebijakan (X) berpengaruh terhadap variabel pengembangan usaha (Y).
3. Penelitian oleh Gabriella Kristiany Sitorus, Joyce J. Rares, Novva N. Plangiten (2020). Dengan judul Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. Dari hasil analisis statistik regresi dan koefisien determinasi tersebut ternyata implementasi program keluarga harapan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa ada pengaruh implementasi program keluarga harapan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon
  4. Penelitian oleh Indah Rizkia Rukmana, J. H. Posumah, F. M. G. Tulusan (2013). Dengan judul Pengaruh Implementasi Program Pelayanan Keluarga Berencana (Kb) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB yang signifikan positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Oleh karena itu pelaksanaan program KB harus dilakukan dengan baik sehingga berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.
  5. Penelitian oleh Ardillawati Fadlia (2019). Dengan judul Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kanrung Cabang Sinjai Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat karena diperoleh nilai *t*hitung sebesar 8,322 dan tabel sebesar 1,986 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai *t*hitung lebih besar dari tabel dengan signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%), karena tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kanrung Cabang Sinjai berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.
  6. Penelitian oleh Valery Manopo, Very Y. Londa, Alden Laloma (2022). Dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Wanea Kota Manado. Penelitian ini ingin menjabarkan atau memberikan elaborasi tentang bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Wanea. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan kebijakan pengelolaan kebersihan di kecamatan wanea, setelah adanya kelimpahan wewenang kepada pemerintah Kota Manado. Sementara jika melihat tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk bersama membantu pemerintah sebagai implementor kebijakan sudah nyata terlihat partisipasinya.

Untuk

652

mengimplementasikan kebijakan publik tentang pengelolaan kebersihan di Kecamatan Wanea setiap stake holders berperan serta aktif ikut pengelolaan kebersihan. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pengelolaan kebersihan di kecamatan wanea kota manado mengacu pada peraturan Walikota Manado Nomor 13 tahun 2016 tentang kewenangan pengelolaan kebersihan ke kecamatan wanea kota manado. Implementasi kebijakan dilihat dari empat aspek yaitu standar kebijakan dan sasaran, komunikasi, serta aspek sikap atau disposisi.

## Konsep Teori

### Konsep Implementasi Program

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004:64) adalah “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Sementara Donald S. Van Metter dan Carl E. Va dalam Widodo (2010:86) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan: Implementasi kebijakan mengkompensasi tindakan tersebut oleh individu (atau kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Ini termasuk upaya untuk mengubah keputusan menjadi istilah operasional, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

#### 2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

#### 3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai

kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

### **Konsep Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu jenis kredit yang terbentuk dari hasil kerjasama dengan pemerintah. Kredit ini diberikan melalui bank sebagai kreditur atau penyedia dana untuk masyarakat yang ingin membangun usaha sendiri. Karena merupakan bagian dari program kerja pemerintah maka pengucuran dari KUR ini umumnya dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank milik negara.

Bagi UMKM, manfaat KUR adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sementara bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

### **Konsep Pengembangan Usaha Mikro**

Menurut Nurrohmah, (2015:20) Pengembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Pengembangan dalam usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai dan

terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Pengembangan adalah wujud kesuksesan dalam berusaha yang dapat dilihat dengan jumlah penjualan yang semakin meningkat, kemampuan pengusaha dalam meraih peluang usaha yang ada dan berinovasi, luasnya pasar yang dikuasai, mampu bersaing, mempunyai akses yang luas terhadap lembaga keuangan sehingga dapat meningkatkan pembiayaan usaha.

Banyak faktor yang mempengaruhi keberadaan, pertumbuhan atau pola pengembangan usaha mikro, di antaranya adalah tingkat pendapatan dan kepadatan penduduk yang dimana kepadatan penduduk akan mempengaruhi proses permintaan dan penawaran, dijelaskan dalam suatu wilayah jika suatu pendapatan perkapita meningkat maka akan mempengaruhi permintaan terhadap produk-produk buatan usaha mikro dan selanjutnya volume produksi dan kesempatan kerja di usaha mikro tersebut akan lebih tinggi.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik individu perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1995.

Menurut Ananda, (2012:14) indikator pengembangan usaha kecil dapat diukur sebagai berikut:

#### 1. Modal Usaha

Kemampuan finansial perusahaan dalam menjalankan operasional usaha untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor yang paling penting dalam sebuah proses produksi adalah modal. Pengertian modal dalam hal ini bukanlah satu kiasan modal mempunyai arti barang apapun yang digunakan untuk memenuhi atau mencapai suatu tujuan. Modal menjadi 2

golongan, yaitu barang yang tidak habis dalam sekali produksi dan barang yang langsung habis dalam proses produksi.

2. Omzet penjualan

Adalah jumlah total hasil produksi yang dapat dijual dalam sekali bakulan atau penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha UMK. Omzet penjualan merupakan keseluruhan dari jumlah penjualan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.

3. Keuntungan

Jumlah produk yang telah laku terjual, dibeli konsumen dan hasil penjualan dibagi dengan keuntungan penjualan yang ditawarkan. Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan dapat ditentukan dengan cara mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Adapun biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk pembelian bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga, sewa tanah, dan penghapusan (depresiasi). Apabila hasil penjualan yang diperoleh kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut nilainya adalah positif maka perusahaan atau pembukuan, keuntungan adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Menurut sudut pandang ekonomi, definisi keuntungan menurut perusahaan cakupannya terlalu luas karena tidak mempertimbangkan biaya tersembunyi. Biaya tersembunyi adalah biaya produksi yang tidak dibayar dengan uang tapi keberadaannya tetap perlu diperhitungkan sebagai bagian dari biaya produksi. Arti dari keuntungan ekonomi itu sendiri adalah keuntungan dari sudut pandang perusahaan dikurangi oleh biaya tersembunyi.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan rumus statistik untuk membantu menganalisa data dan fakta yang diperoleh. Hartono (2011:85) menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan menggunakan metode statistika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan yang ada di Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa penulis menggunakan 4 dimensi dari implementasi kebijakan dari George Edward III dalam Widodo (2010:96) yaitu, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi, yaitu proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Dimensi komunikasi dalam penelitian ini yaitu terdiri dari indikator, koordinasi pelaksanaan program kredit usaha rakyat kepada masyarakat, koordinasi antara pihak bank dengan aparatur Desa/Kecamatan, koordinasi antara pihak Kecamatan dengan pelaku usaha mikro. Dalam pelaksanaan implementasi program KUR di Kecamatan Tondano Utara, koordinasi kepada masyarakat oleh pihak pelaksana kredit usaha rakyat sudah terlaksana dengan cukup baik, namun masih perlu dimaksimalkan lagi, begitu juga dengan koordinasi antara pihak bank dan aparatur

Desa/Kecamatan sudah cukup baik, namun perlu di maksimalkan lagi. Koordinasi antara pihak Kecamatan dengan pelaku usaha mikro bisa dikatakan cukup baik, namun perlu dimaksimalkan lagi.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya, ialah meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Dimensi sumber daya dalam penelitian ini adalah, sosialisasi program kredit usaha rakyat, jangkauan program KUR di wilayah Kecamatan Tondano Utara, pelaku usaha mikro terbantu dengan adanya program KUR, program KUR tidak memberatkan nasabah, program KUR mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, program KUR mampu meningkatkan usaha bagi para pelaku usaha mikro, dan program KUR merupakan solusi dalam mengakses permodalan. Sosialisasi program kredit usaha rakyat yang dilakukan oleh pihak penyelenggara program kredit usaha rakyat kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik, program kredit usaha rakyat di wilayah Tondano Utara jangkauannya terhadap pelaku usaha mikro belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi. Program kredit usaha rakyat ini dapat dikatakan tidak memberatkan nasabah, dengan adanya program kredit usaha rakyat pelaku usaha mikro merasa terbantu dalam hal mengakses permodalan, dan lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta meningkatkan usaha masyarakat.

## 3. Disposisi

Disposisi, adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan

untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dimensi disposisi dalam penelitian ini ialah, penjelasan dan pelayanan mengenai program KUR, kemudahan dalam mengajukan program KUR, pelaku usaha sudah mengetahui program kredit usaha rakyat. Penjelasan dan pelayanan tentang program kredit usaha rakyat masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan lagi. Kemudahan dalam menjangkau program kredit usaha rakyat dapat dikatakan sudah cukup baik. Pelaku usaha sudah mengetahui mengenai program kredit usaha rakyat, dalam hal ini para pelaku usaha mikro sudah mengetahui tentang program kredit usaha rakyat namun para pelaku masih belum mengerti dan paham tentang prosedur dan kegunaan dari program kredit usaha tersebut.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ialah, mencakup aspek-aspek seperti pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Dimensi struktur birokrasi dalam penelitian ini yaitu, prosedur pengajuan KUR sudah sesuai dengan aturan, sanksi yang tegas jika melakukan penyalahgunaan program KUR, apresiasi dari pemerintah daerah terhadap program KUR. Dalam implementasi program kredit usaha rakyat prosedur pengajuan kredit sudah sesuai dengan aturan dan berjalan dengan baik, dalam program kredit usaha rakyat jika melakukan penyalahgunaan KUR akan dikenakan sanksi yang tegas. Apresiasi dari pemerintah terhadap program KUR sudah baik.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh Implementasi Program Kredit

Usaha Rakyat reliabel dengan nilai 0,847 dan variabel pengembangan usaha mikro masyarakat reliabel dengan nilai 0,189 dari hasil temuan penulis dengan berdasarkan populasi yang diambil, yaitu pelaku usaha mikro yang menggunakan kredit usaha rakyat di Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa dengan menggunakan 40 responden serta 26 butir pertanyaan yang dinyatakan valid karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .

Berdasarkan hasil uji linearitas diperoleh Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat dengan Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat terdapat hubungan yang linear secara signifikan dengan nilai signifikansi yang diperoleh, yaitu  $0,936 > 0,05$ .

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat di Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa. Dimana berdasarkan hasil dari analisis regresi linear sederhana diperoleh  $Y = 29,440 + 0,175X$ . Hasil tersebut menunjukkan antara variabel Implementasi Program KUR (X) dengan variabel Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat (Y) terdapat besaran pengaruh yang linear, pada setiap penambahan 1% nilai Implementasi Program KUR, maka nilai Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat bertambah 0,175. Dan dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t (parsial) diperoleh nilai t hitung sebesar 6,789 dengan t tabel sebesar 1,686 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%), sehingga penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa “ Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat

(KUR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat di Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa”.

Selanjutnya dari hasil perhitungan koefisien determinasi didapatkan persentase besarnya pengaruh implementasi program KUR terhadap pengembangan usaha mikro masyarakat sebesar 54,8%. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi program KUR dan pengembangan usaha mikro masyarakat. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model yang diteliti yaitu sebesar 45,2%.

Dengan demikian hasil pengujian yang telah diuraikan di atas yaitu Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh signifikan terhadap Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat di Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program kredit usaha rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha mikro masyarakat di Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Pengaruh Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat terhadap Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat dapat teruji secara empiris dengan memaksimalkan implementasi program kredit usaha rakyat agar mampu

mengembangkan usaha mikro masyarakat di Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator yang telah diteliti oleh penulis sebagai berikut:

1. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana program kredit usaha rakyat dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, begitu juga dengan koordinasi yang dilakukan kepada pemerintah oleh pihak pelaksana program kredit usaha rakyat ini sudah berjalan dengan baik sehingga ini dapat menjadi acuan penting dalam terlaksananya implementasi program kredit usaha rakyat dengan baik.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana program kredit usaha rakyat kepada masyarakat masih belum berjalan dengan baik sehingga masih banyak para pelaku usaha mikro yang belum paham mengenai kegunaan, dan prosedur penggunaan kredit usaha rakyat. Begitu juga dengan jangkauan program kredit usaha rakyat di Kecamatan Tondano Utara dapat dikatakan belum maksimal, dikarenakan masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mengetahui tentang program kredit usaha rakyat.
3. Prosedur pelayanan dan penjelasan mengenai kredit usaha rakyat, dalam hal ini pihak bank dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat masih kurang baik. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang persyaratan pengambilan kredit usaha rakyat.
4. Prosedur pengajuan kredit usaha rakyat sudah sesuai aturan, dalam hal ini proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah berjalan dengan baik, dan jika melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kredit usaha rakyat akan dikenakan sanksi yang tegas.

Program kredit usaha rakyat mendapat apresiasi yang baik dari pemerintah.

## **SARAN**

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan maka peneliti menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi pemerintah, diharapkan untuk kedepannya pemerintah dan dinas yang terkait untuk lebih mensejahterakan rakyatnya salah satunya dalam bidang usaha mikro dimana usaha mikro sangat berperan penting dalam usaha masyarakat umum menengah kebawah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian tentang pengembangan usaha mikro dengan menggunakan beberapa variabel lainnya yang tidak dijelaskan di dalam penelitian ini.
3. Bagi pelaku usaha mikro, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau saran untuk terus mengembangkan usaha mikro melalui penggunaan kredit usaha rakyat.
4. Bagi pihak pelaksana program kredit usaha rakyat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran untuk lebih memaksimalkan dan meningkatkan sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih banyak yang menggunakan program kredit usaha rakyat dalam mengakses permodalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda, D. A., Susilowati, D. (2012). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis*

- Industri Kreatif di Kota Malang.*  
Jurnal Ilmu Ekonomi 10(10): 120-142
- Fadlia, A. (2019). *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kanrung Cabang Sinjai Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.* Skripsi: Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Ilmu Sosial Dan Politik. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Manoppo, V., Londa, V., Laloma, A. (2022). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Wanea Kota Manado.* Jurnal Administrasi Publik. Vol. 8 No. 119
- Mondong, A., Tulusan, F., Plangiten, N. (2022). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Langsung Tunai UMKM Terhadap Pengembangan Usaha di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.* Jurnal Administrasi Publik. Vol. 8 No. 114. Hal. 1-9
- Nurrohmah, I. 2015. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyaraka pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringharjo Yogyakarta).* Skripsi: Fakultas Ekonomi. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta
- Sitorus, G. K., Rares, J. J., Plangiten, N. (2020). *Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.* Jurnal Administrasi Publik. Vol. 6 No.91. Hal. 1-8
- Solichin, A. W. 2004. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara
- Suoth, A. E. P. dkk. (2019). *Pengaruh Implementasi Program BUMDES Terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Desa Tonsewer Selatan Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa.* Jurnal: JAP. Universitas Sam Ratulangi
- Widodo, J. 2010. *Analisis Kebijakan Publik dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Malang: Bayu Media Publishing